



Transparan Gunakan Anggaran

SINGKAWANG- Laporan Keuangan Pemerintah merupakan suatu pelaporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan. Bertujuan menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Pemerintah terkait. Hal tersebut diungkapkan Wali kota Singkawang, Awang Ishak ketika menyampaikan Nota Pengantar Walikota tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 pada Rapat Paripurna, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Singkawang, Selasa (13/8).

Disebutkan Awang, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selama 30 hari pada 20 Mei 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Kalbar tersebut, kemudian disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah

pada tanggal 26 Juli 2013, dimana diberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)".

Wali Kota Singkawang, Awang Ishak menyebutkan penyampaian Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2012 kepada DPRD, dalam rangka memenuhi ketentuan

Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pasal 101 bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud, antara lain laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas, dan atas laporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keempatnya menunjukkan bahwa transparannya informasi pengelolaan keuangan daerah," katanya. Laporan Keuangan Pemkot Singkawang terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 telah disampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Singkawang pada tanggal 22 Juli 2013 untuk diadwalkan dan dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sambil menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. (jah)